



DPRD Minta Pemprov DKI Pasok Minyak Goreng



Ketua Komisi B, Ismail ingatkan Pemprov DKI terkait kelangkaan minyak goreng

Poskota/Aldi

JAKARTA (Poskota) - Komisi B DPRD DKI Jakarta mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bagaimana rentannya kelangkaan minyak goreng jelang Ramadan dan Idul Fitri. Pemprov diminta untuk terus menjaga ketersediaan hingga timbul stabilisasi harga komoditas pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Pasalnnya, sejauh ini sejumlah komoditas seperti beras premium, telur, cabai dan bawang telah mengalami kenaikan harga. Dan untuk minyak goreng sangat rentan untuk kembali mengalami kelangkaan, hingga pada akhirnya mengalami gejolak harga.

"Ini perlu konsen soal minyak goreng karena ini yang sering tidak terduga. Belajar dari pengalaman kemarin, itu kan sangat rentan tiba-tiba hilang dari pasaran. Ini satu hal yang perlu diantisipasi. Karena ini yang jadi pencetus masyarakat itu jadi panik buying," ujar Ismail di

Jakarta, dikutip Rabu (22/3).

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Hasan Basri Umar mengatakan, pemerintah harus menyadari bahwa inflasi di Jakarta sangat memengaruhi inflasi nasional. Karena itu, pemerintah DKI dan pemerintah pusat sama-sama berupaya menjaga stabilitas harga pangan di DKI.

"Saya baru saja dari pasar. Minyak kita sekarang jadi Rp15 ribu satu kemasan. Daging tadi saya cek Rp140 ribu. Terus beras rata-rata naiknya Rp500 sampai Rp1.000. Lalu bawang merah, bawang putih dan cabai juga naik," tutur Hasan Basri.

Kemudian Asisten Perencanaan dan Keuangan Pemprov DKI Sri Haryati menjelaskan, pihaknya menyadari angka inflasi di DKI Jakarta akan berdampak terhadap angka inflasi nasional. Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga bahan pangan. Karena itu,

Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat bergandengan tangan melakukan langkah-langkah taktis untuk menjaga stabilitas harga.

"Bagaimana kami mengawasi angka inflasi, kami tentu bekerjasama dengan Satgas Pangan, jadi kemarin Pak Kapolda Metro Jaya juga mengajak kami rapat bersama seluruh Kapolres meminta untuk turun ke lapangan tapi tentu pasokan komoditasnya ada dulu. Supaya jangan bilang nggak boleh naikin harga tapi suplainya nggak ada. Untuk itu Pak Gubernur juga berkomunikasi intens dengan Dirut Bulog untuk memonitoring dan memastikan pasokan," ungkap Sri.

Selain itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, untuk mencegah inflasi akibat kenaikan harga komoditas pangan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah antisipasi sesuai arah-

an Presiden Joko Widodo.

"Ada tiga hal yang kita lakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Pada tanggal 17 Januari 2023, beliau (Presiden Joko Widodo) menyampaikan, bahwa seluruh kepala daerah, Gubernur, Walikota, Bupati agar mengecek secara langsung ke lapangan tentang harga komoditas apakah sudah sesuai. Presiden juga menyampaikan agar dipantau, dijaga secara langsung pasokan serta harga pangan pokoknya. Terutama produksi beras sehingga dapat mengontrol angka inflasi di masing-masing daerah," ujar dia.

Diketahui, berdasarkan laporan dari Perumda Dharma Jaya, stok daging sapi saat ini mencapai 474 ton. Rencananya, PD Dharma Jaya akan menambah stok hingga mencapai 500 ton untuk mengamankan kebutuhan bulan Maret hingga April.

Sementara stok daging ayam masih surplus. Saat ini mencapai 572 ton untuk bulan Maret dan April. Lalu, stok ikan mencapai 212 ton dari rencana sebanyak 350 ton untuk kebutuhan bulan Maret dan April. Di sisi lain, stok ternak sapi saat ini mencapai 500 ekor dan rencananya akan ditambah hingga 1.150 ekor untuk keburu bulan Maret dan April.

PT Food Station Tjipinang Jaya menyiapkan 26.396 ton beras di gudang perusahaan itu. Sementara untuk kebutuhan Idul Fitri, stok gula di gudang perusahaan itu mencapai 1.022 ton, minyak goreng sebanyak 70.800 liter, telur sebanyak 20 ton, dan tepung terigu sebanyak 88 ton. **(Aldi/Ifn)**